



DPPEAD

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.20.1.20.01.28.09.5.2 pada Jenis Belanja Langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 9 Seri A);
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah serta tugas pembantuan.

BAB II PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 berada pada Jenis Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.20.1.20.01.28.09.5.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 April 2015
BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 22

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Sebelum Revisi		Setelah Revisi		Keterangan
	Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.595.404.348.982,00	PENDAPATAN DAERAH	2.595.404.348.982,00	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	311.112.374.781,00	Pendapatan Asli Daerah	311.112.374.781,00	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	55.667.000.000,00	Hasil Pajak Daerah	55.667.000.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.460.088.000,00	Hasil Retribusi Daerah	11.460.088.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.526.697.759,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.526.697.759,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.458.589.022,00	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.458.589.022,00	
4.2	Dana Perimbangan	2.073.962.203.000,00	Dana Perimbangan	2.073.962.203.000,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.868.437.899.000,00	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.868.437.899.000,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	185.019.984.000,00	Dana Alokasi Umum	185.019.984.000,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	20.504.320.000,00	Dana Alokasi Khusus	20.504.320.000,00	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	210.329.771.201,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	210.329.771.201,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.339.603.201,00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.339.603.201,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.578.768.000,00	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.578.768.000,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	5.411.400.000,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	5.411.400.000,00	
5	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.595.404.348.982,00	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.595.404.348.982,00	
5.1	BELANJA DAERAH	3.235.004.348.982,00	BELANJA DAERAH	3.235.004.348.982,00	
5.1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.110.296.464.448,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.110.296.464.448,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	750.909.042.345,00	Belanja Pegawai	750.909.042.345,00	
5.1.3	Belanja Subsidi	9.229.150.682,00	Belanja Subsidi	9.229.150.682,00	
5.1.4	Belanja Hibah	112.046.120.000,00	Belanja Hibah	112.046.120.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.699.060.000,00	Belanja Bantuan Sosial	10.699.060.000,00	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.000.000.000,00	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.000.000.000,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	224.413.091.421,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	224.413.091.421,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.124.707.884.534,00	BELANJA LANGSUNG	2.124.707.884.534,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	214.271.230.000,00	Belanja Pegawai	214.271.230.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	681.939.869.467,00	Belanja Barang dan Jasa	681.939.869.467,00	
5.2.3	Belanja Modal	1.228.496.785.067,00	Belanja Modal	1.228.496.785.067,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.235.004.348.982,00	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.235.004.348.982,00	
	Surplus / (Defisit)	(639.600.000.000)	Surplus / (Defisit)	(639.600.000.000)	

Nomor Urut	Sebelum Revisi		Setelah Revisi		Keterangan
	Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	767.600.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	767.600.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	767.600.000.000,00	Pembiayaan Netto	767.600.000.000,00	
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	128.000.000.000,00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	128.000.000.000,00	


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINCIAN PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1.02 ~ Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 ~ Dinas Kesehatan

KODE REKENING			URAIAN SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	URAIAN SETELAH PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1			2		3	4		5	6
1.02	1.02.01	5 2	BELANJA LANGSUNG		101.467.541.768,00	BELANJA LANGSUNG		101.467.541.768,00	
1.02	1.02.01	5 2	Dinas Kesehatan		101.467.541.768,00	Dinas Kesehatan		101.467.541.768,00	
1.02	1.02.01.01	5 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.947.259.768,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.947.259.768,00	
1.02	1.02.01.01.01	5. 2	Penyediaan jasa surat menyurat		13.500.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat		13.500.000,00	
1.02	1.02.01.01.02	5. 2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik		455.700.000,00	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik		455.700.000,00	
1.02	1.02.01.01.02	5. 2	Penyediaan jasa kebersihan kantor		281.969.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor		281.969.000,00	
1.02	1.02.01.01.08	5. 2	Penyediaan alat tulis kantor		186.965.258,00	Penyediaan alat tulis kantor		186.965.258,00	
1.02	1.02.01.01.10	5. 2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		94.654.510,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		94.654.510,00	
1.02	1.02.01.01.11	5. 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		19.495.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		19.495.000,00	
1.02	1.02.01.01.12	5. 2							
1.02	1.02.01.01.15	5. 2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		18.720.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		18.720.000,00	
1.02	1.02.01.01.17	5. 2	Penyediaan makanan dan minuman		451.100.000,00	Penyediaan makanan dan minuman		451.100.000,00	
1.02	1.02.01.01.18	5. 2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		622.466.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		622.466.000,00	
1.02	1.02.01.01.19	5. 2	Penyediaan jasa keamanan kantor		172.800.000,00	Penyediaan jasa keamanan kantor		172.800.000,00	
1.02	1.02.01.01.20	5. 2	Penyediaan jasa administrasi kantor		2.514.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi kantor		2.514.000.000,00	
1.02	1.02.01.01.22	5. 2	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah		115.890.000,00	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah		115.890.000,00	
1.02	1.02.01.02	5. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		10.172.645.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		10.172.645.000,00	
1.02	1.02.01.02.05	5. 2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		582.670.000,00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		582.670.000,00	
1.02	1.02.01.02.07	5. 2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		243.355.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		243.355.000,00	
1.02	1.02.01.02.09	5. 2	Pengadaan peralatan gedung kantor		78.900.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor		78.900.000,00	
1.02	1.02.01.02.10	5. 2	Pengadaan mebeleur		144.233.000,00	Pengadaan mebeleur		144.233.000,00	
1.02	1.02.01.02.11	5. 2	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya		165.900.000,00	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya		165.900.000,00	
1.02	1.02.01.02.24	5. 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		525.900.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		525.900.000,00	
1.02	1.02.01.02.30	5. 2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		47.300.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		47.300.000,00	
1.02	1.02.01.02.42	5. 2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		550.567.000,00	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		550.567.000,00	
1.02	1.02.01.02.88	5. 2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Kesehatan Daerah		7.833.820.000,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Kesehatan Daerah		7.833.820.000,00	
1.02	1.02.01.03	5. 2	Program peningkatan disiplin aparatur		367.600.000,00	Program peningkatan disiplin aparatur		367.600.000,00	
1.02	1.02.01.03.02	5. 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		367.600.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		367.600.000,00	
1.02	1.02.01.05	5. 2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		964.308.500,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		964.308.500,00	
1.02	1.02.01.05.06	5. 2	Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD		310.446.000,00	Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD		310.446.000,00	
1.02	1.02.01.05.07	5. 2	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional		96.080.000,00	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional		96.080.000,00	

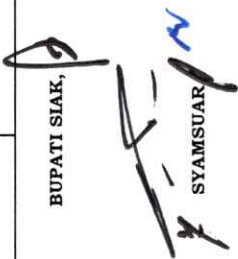
KODE REKENING			URAIAN SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	URAIAN SETELAH PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1			2		3	4		5	6
1. 02	1.02.01.05.59	5. 2			55.135.000,00		Pelatihan tentang Pengendalian Penyakit	55.135.000,00	
1. 02	1.02.01.05.60	5. 2			416.792.500,00		Pelatihan Petugas Promosi dan Kesehatan Keluarga	416.792.500,00	
1. 02	1.02.01.05.62	5. 2			85.855.000,00		Pelatihan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	85.855.000,00	
1. 02	1.02.01.15	5. 2			6.067.266.000,00		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.067.266.000,00	
1. 02	1.02.01.15.01	5. 2			5.833.166.000,00		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.833.166.000,00	
1. 02	1.02.01.15.02	5. 2			164.100.000,00		Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	164.100.000,00	
1. 02	1.02.01.15.07	5. 2			70.000.000,00		Sosialisasi Penggunaan Obat yang Rasional dan Penyalahgunaan Obat Terapeutik Masyarakat	70.000.000,00	
1. 02	1.02.01.16	5. 2			21.091.708.400,00		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.091.708.400,00	
1. 02	1.02.01.16.16	5. 2			133.898.000,00		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	133.898.000,00	
1. 02	1.02.01.16.17	5. 2			83.678.000,00		Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	83.678.000,00	
1. 02	1.02.01.16.18	5. 2			14.462.304.200,00		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmasdes, dan Polindes	14.462.304.200,00	
1. 02	1.02.01.16.19	5. 2			628.400.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas	628.400.000,00	
1. 02	1.02.01.16.20	5. 2			76.399.850,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Mandau	76.399.850,00	
1. 02	1.02.01.16.21	5. 2			475.600.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kandis	475.600.000,00	
1. 02	1.02.01.16.22	5. 2			455.700.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Siak	455.700.000,00	
1. 02	1.02.01.16.23	5. 2			185.200.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Mempura	185.200.000,00	
1. 02	1.02.01.16.24	5. 2			276.000.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan	276.000.000,00	
1. 02	1.02.01.16.25	5. 2			824.200.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Perawang	824.200.000,00	
1. 02	1.02.01.16.26	5. 2			431.800.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Tualang	431.800.000,00	
1. 02	1.02.01.16.27	5. 2			260.000.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Dayun	260.000.000,00	
1. 02	1.02.01.16.28	5. 2			229.300.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Lubuk Dalam	229.300.000,00	
1. 02	1.02.01.16.29	5. 2			311.600.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Koto Gasib	311.600.000,00	
1. 02	1.02.01.16.30	5. 2			566.200.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Apit	566.200.000,00	
1. 02	1.02.01.16.31	5. 2			380.800.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Bunga Raya	380.800.000,00	
1. 02	1.02.01.16.32	5. 2			152.999.850,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sabak Auh	152.999.850,00	
1. 02	1.02.01.16.33	5. 2			104.000.000,00		Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Pusako	104.000.000,00	
1. 02	1.02.01.16.34	5. 2			316.818.000,00		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reveral Sistem	316.818.000,00	
1. 02	1.02.01.16.35	5. 2			542.262.500,00		Pelayanan Kesehatan pada Event-Event Resmi dan Hari-hari Besar	542.262.500,00	
1. 02	1.02.01.16.38	5. 2			78.150.000,00		Penyelenggaraan Lokakarya Mini Puskesmas	78.150.000,00	
1. 02	1.02.01.16.39	5. 2			116.398.000,00		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Khusus	116.398.000,00	

KODE REKENING				URAIAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	URAIAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4	5	6
1. 02	1.02.01.17	5. 2		Program Pengawasan Obat dan Makanan		Program Pengawasan Obat dan Makanan	125.692.000,00	
1. 02	1.02.01.17.02	5. 2		Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	125.692.000,00	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	125.692.000,00	
1. 02	1.02.01.19	5. 2		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.395.330.000,00	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.395.330.000,00	
1. 02	1.02.01.19.01	5. 2		Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	482.100.000,00	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	482.100.000,00	
1. 02	1.02.01.19.02	5. 2		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	640.876.000,00	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	640.876.000,00	
1. 02	1.02.01.19.06	5. 2		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	272.354.000,00	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	272.354.000,00	
1. 02	1.02.01.20	5. 2		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.025.566.000,00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.025.566.000,00	
1. 02	1.02.01.20.02	5. 2		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1.247.310.000,00	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1.247.310.000,00	
1. 02	1.02.01.20.03	5. 2		Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	606.818.000,00	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	606.818.000,00	
1. 02	1.02.01.20.04	5. 2		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	171.438.000,00	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	171.438.000,00	
1. 02	1.02.01.21	5. 2		Program pengembangan lingkungan sehat	390.402.000,00	Program pengembangan lingkungan sehat	390.402.000,00	
1. 02	1.02.01.21.05	5. 2		Penyehatan Lingkungan	117.861.000,00	Penyehatan Lingkungan	117.861.000,00	
1. 02	1.02.01.21.06	5. 2		Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas	117.760.000,00	Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas	117.760.000,00	
1. 02	1.02.01.21.07	5. 2		Peminaan dan Pengembangan Kabupaten Sehat	154.781.000,00	Peminaan dan Pengembangan Kabupaten Sehat	154.781.000,00	
1. 02	1.02.01.22	5. 2		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.647.992.500,00	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.647.992.500,00	
1. 02	1.02.01.22.08	5. 2		Peningkatan Imunisasi	226.813.000,00	Peningkatan Imunisasi	226.813.000,00	
1. 02	1.02.01.22.12	5. 2		Pengendalian Penyakit Menular Langsung	148.046.000,00	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	148.046.000,00	
1. 02	1.02.01.22.13	5. 2		Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	800.473.500,00	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	800.473.500,00	
1. 02	1.02.01.22.14	5. 2		Pengendalian penyakit tidak menular	78.650.000,00	Pengendalian penyakit tidak menular	78.650.000,00	
1. 02	1.02.01.22.15	5. 2		Peningkatan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji	117.342.000,00	Peningkatan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji	117.342.000,00	
1. 02	1.02.01.22.16	5. 2		Peningkatan Survelians Epidemiologi dan Kesehatan Matra	148.778.000,00	Peningkatan Survelians Epidemiologi dan Kesehatan Matra	148.778.000,00	
1. 02	1.02.01.22.17	5. 2		Penyelenggaraan Penanggulangan HIV/AIDS	127.890.000,00	Penyelenggaraan Penanggulangan HIV/AIDS	127.890.000,00	
1. 02	1.02.01.23	5. 2		Program standarisasi pelayanan kesehatan	801.385.000,00	Program standarisasi pelayanan kesehatan	801.385.000,00	
1. 02	1.02.01.23.03	5. 2		Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	53.610.000,00	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	53.610.000,00	
1. 02	1.02.01.23.07	5. 2		Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Untuk Puskesmas	295.400.000,00	Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Untuk Puskesmas	295.400.000,00	
1. 02	1.02.01.23.08	5. 2		Penyelenggaraan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum (BLUD)	452.375.000,00	Penyelenggaraan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum (BLUD)	452.375.000,00	
1. 02	1.02.01.25	5. 2		Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	21.443.871.500,00	Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	21.443.871.500,00	
1. 02	1.02.01.25.01	5. 2		Pembangunan puskesmas	7.714.135.000,00	Pembangunan puskesmas	7.714.135.000,00	
1. 02	1.02.01.25.02	5. 2		Pembangunan puskesmas pembantu	2.533.756.500,00	Pembangunan puskesmas pembantu	2.533.756.500,00	
1. 02	1.02.01.25.06	5. 2		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.892.200.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.892.200.000,00	
1. 02	1.02.01.25.07	5. 2		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	2.815.550.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	2.815.550.000,00	
1. 02	1.02.01.25.20	5. 2		Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	2.270.470.000,00	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	2.270.470.000,00	
1. 02	1.02.01.25.23	5. 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes	3.378.160.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes	3.378.160.000,00	
1. 02	1.02.01.25.25	5. 2		Pengadaan Meubeleur Puskesmas, Pustu, Plolindes dan Poskesdes	195.600.000,00	Pengadaan Meubeleur Puskesmas, Pustu, Plolindes dan Poskesdes	195.600.000,00	

KODE REKENING					URAIAN SEBELUM PERUBAHAN		URAIAN SETELAH PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1					2		4		5	6	
1. 02	1.02.01.25.26	5. 2			Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes dan Poskesdes		Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes dan Poskesdes		644.000.000,00	644.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28	5. 2			Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		29.654.067.100,00	29.654.067.100,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2			<i>Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda)</i>		<i>Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda)</i>		28.543.731.100,00	28.543.731.100,00	PERGESERAN
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2			BELANJA LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG		28.543.731.100,00	28.543.731.100,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1		Belanja Pegawai		Belanja Pegawai		38.000.000,00	38.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1	01	Honorarium PNS		Honorarium PNS		24.000.000,00	24.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1	01	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		10.000.000,00	10.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1	01	Honorarium PPTK (1 Org x 10 Bln)		Honorarium PPTK (1 Org x 10 Bln)		10.000.000,00	10.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1	01	Honorarium Staf PPTK		Honorarium Staf PPTK		14.000.000,00	14.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1	01	Honorarium Staf PPTK (2 Org x 10 Bln)		Honorarium Staf PPTK (2 Org x 10 Bln)		14.000.000,00	14.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1	02	Honorarium Non PNS		Honorarium Non PNS		14.000.000,00	14.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1	02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap		Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap		14.000.000,00	14.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	1	02	Honorarium Staf PPTK (2 Org x 10 Bln)		Honorarium Staf PPTK (2 Org x 10 Bln)		14.000.000,00	14.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2		Belanja Barang dan Jasa		Belanja Barang dan Jasa		28.505.731.100,00	28.505.731.100,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	03	Belanja Jasa Kantor		Belanja Jasa Kantor		24.170.000.000,00	24.170.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	03	Belanja jasa perawatan kesehatan		Belanja jasa perawatan kesehatan		24.170.000.000,00	24.170.000.000,00	PERGESERAN
					- <i>Biaya pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK 1</i>		- <i>Biaya pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK 1</i>		3.765.054.304,00	3.765.054.304,00	
					- Biaya pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK 2		- Biaya pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK 2		5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	
					- Biaya pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK 3		- Biaya pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK 3		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
					- Biaya pelayanan kesehatan kebidanan dan persalinan		- Biaya pelayanan kesehatan kebidanan dan persalinan		1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	
					- Biaya rujukan gawat darurat pasien dan biaya pemulangan jenazah		- Biaya rujukan gawat darurat pasien dan biaya pemulangan jenazah		35.000.000,00	35.000.000,00	
					- Biaya perawatan yang tidak termasuk dalam SJP/PKS serta selisih biaya		- Biaya perawatan yang tidak termasuk dalam SJP/PKS serta selisih biaya		125.000.000,00	125.000.000,00	
					- <i>Biaya tunggakan pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK1 TA.2014</i>		- <i>Biaya tunggakan pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK1 TA.2014</i>		11.234.945.696,00	11.234.945.696,00	PERGESERAN
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	04	Belanja Premi Asuransi		Belanja Premi Asuransi		3.838.771.100,00	3.838.771.100,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan		Belanja Premi Asuransi Kesehatan		3.838.771.100,00	3.838.771.100,00	
					Biaya premi asuransi kesehatan masyarakat miskin integrasi ke BPJS (23.771 org x 12 bulan x 70%)		Biaya premi asuransi kesehatan masyarakat miskin integrasi ke BPJS (23.771 org x 12 bulan x 70%)		3.838.771.100,00	3.838.771.100,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		150.000.000,00	150.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	07	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		Belanja sewa gedung/ kantor/tempat		150.000.000,00	150.000.000,00	
					Akomodasi pasien dan pendamping pasien jamkesda dan diluar Jamkesda		Akomodasi pasien dan pendamping pasien jamkesda dan diluar Jamkesda		150.000.000,00	150.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		Belanja Sewa Sarana Mobilitas		236.960.000,00	236.960.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	08	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		20.000.000,00	20.000.000,00	
					Biaya transportasi pasien, keluarga pasien dan pendamping pasien PP dari PPK 3		Biaya transportasi pasien, keluarga pasien dan pendamping pasien PP dari PPK 3		20.000.000,00	20.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2	08	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara		Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara		216.960.000,00	216.960.000,00	
					- Biaya transportasi rujukan pasien jamkesda dan diluar Jamkesda ke PPK 3 di Jakarta		- Biaya transportasi rujukan pasien jamkesda dan diluar Jamkesda ke PPK 3 di Jakarta		96.600.000,00	96.600.000,00	
					- Biaya transportasi rujukan pendamping keluarga pasien jamkesda dan diluar Jamkesda ke PPK 3 di Jakarta		- Biaya transportasi rujukan pendamping keluarga pasien jamkesda dan diluar Jamkesda ke PPK 3 di Jakarta		96.600.000,00	96.600.000,00	

KODE REKENING				URAIAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	URAIAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4	5	6
				- Biaya transportasi rujukan pasien jamkesda dan diluar Jamkesda ke PPK 3 di Solo	11.880.000,00	- Biaya transportasi rujukan pasien jamkesda dan diluar Jamkesda ke PPK 3 di Solo	11.880.000,00	
				- Biaya transportasi rujukan pendamping keluarga pasien jamkesda dan diluar Jamkesda ke PPK 3 di Solo	11.880.000,00	- Biaya transportasi rujukan pendamping keluarga pasien jamkesda dan diluar Jamkesda ke PPK 3 di Solo	11.880.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman	110.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.09	5. 2	2 11 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	110.000.000,00	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	110.000.000,00	
				Biaya makan pasien dan pendamping pasien rujukan jamkesda	110.000.000,00	Biaya makan pasien dan pendamping pasien rujukan jamkesda	110.000.000,00	
1. 02	1.02.01.28.10	5. 2		Pendampingan dan Penunjang Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.110.336.000,00	Pendampingan dan Penunjang Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.110.336.000,00	
1. 02	1.02.01.31	5. 2		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	123.166.000,00	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	123.166.000,00	
1. 02	1.02.01.31.02	5. 2		Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	34.178.000,00	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	34.178.000,00	
1. 02	1.02.01.31.05	5. 2		Pengawasan dan Pengendalian Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman	88.988.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman	88.988.000,00	
1. 02	1.02.01.32	5. 2		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	249.282.000,00	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	249.282.000,00	
1. 02	1.02.01.32.04	5. 2		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	123.951.000,00	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	123.951.000,00	
1. 02	1.02.01.32.05	5. 2		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	125.331.000,00	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	125.331.000,00	

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR